BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Kawnwil Jabar I Bandung

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda, dalam perang dunia I (1914-1918) keadaan keuangan seluruh dunia mengalami kehancuran sehingga Negara terpaksa melakukan pemungutan pajak melalui sistem dan cara yang disesuaikan dengan Negara masing-masing. Pajak didirikan di Indonesia dengan nama Carlogo Veganes Blasting (Pajak Penghasilan). Pada zaman colonial Belanda, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh *De Inspectie Van Financian* yaitu badan yang mengurus pemungutan pajak dari rakyat untuk Negara berdasarkan Undang-undang Kolonial Belanda.

Pada zaman penjajahan Jepang tepatnya tanggal 9 Maret 1942 *De Inspective Van Financian* diganti oleh suatu badan yang mengurus keuangan dibawah pemerintah Jepang yang bernama *Zaimu*, kemudian Jepang menyerah kepada sekutu, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka *Zaimu* diganti menjadi Inspeksi keuangan untuk seluruh kota Bandung, kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjaran. Khususnya untuk Inspeksi keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung Concordia (Sekarang Gedung Merdeka) yang berada di Jalan Raya Barat (Sekarang Jalan Asia Afrika).

Agresi Militer (1948) Ibu Kota Republik Yogyakarta diserbu dan mengakibatkan terjadinya perang yang dahsyat. Perundingan-perundingan dilakukan, Pemerintah Belanda mengakui Kemerdekaan republik Indonesia maka Inspeksi Keuangan Bandung yag betempat di Jalan Asia Afrika Bandung namanya diubah

menjadi Inspeksi Pajak. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengubah Inspeksi Pajak Bandung berdasarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1414/KMK.01/1979 tanggal 5 April 1979, Inspeksi Pajak tersebut menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung (Gedung Keuangan Negara), meliputi daerah wewenang kota Bandung bagian Timur dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, sementara berkedudukan di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung. Kemudian pada tahun 1981 pindah ke Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung yang meliputi daerah Majalaya, Kecamatan Cikalong Wetan dan Kotif Cimahi.

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Mulai tanggan 1 April 1994 terjadi reoorganisasi, dimana KPP yang ada di Kota dan kabupaten Badnung terdiri dari 5 KPP, diantaranya yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21 Bandung
4. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung
5. KPP Cimahi, Jalan Raya Barat No. 5774 Cimahi.

Kemudian pada bulan Agustus 2007 terdapat perubahan dari Kantor Pelayanan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana Kantor Pelayan Pajak, Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dari Karikpa menjadi satu dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri :

1. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung
2. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21 Bandung

4. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Ir.Sutami No. 1 Bandung
5. KPP Cimahi, Jalan Amir Mahmud No. 574
6. KPP Pratama Majalaya, Jalan Peta No.7 Bandung
7. KPP Pratama Soreang, Jalan Raya Cimarem No. 205
8. KPP Pratama Sumedang, Jalan Ibrahim Adjie No. 372
9. KPP Pratama Karees, Jalan Ibrahim Adjie No. 372
10. KPP Madya Bandung, Jalan. Asia Afrika No.114

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu :

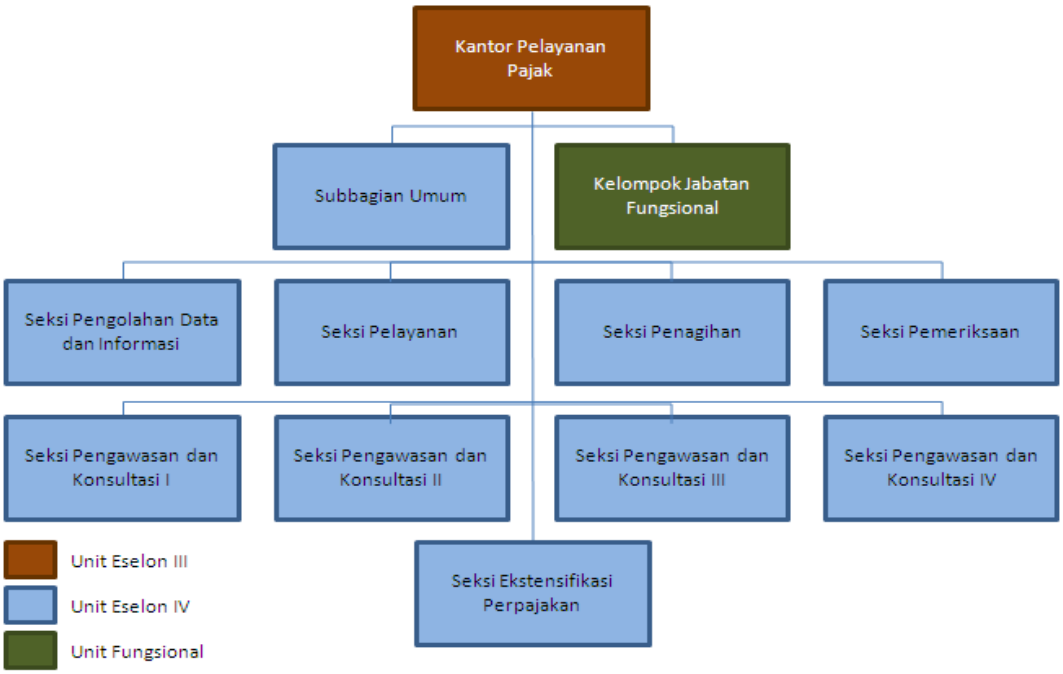
1. Visi

   Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi
   a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
   b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
   c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undangundang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.
   d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

4.1.2 Struktur Organisasi KPP Daerah Kanwil Jabar I Bandung

Struktur organisasi merupakan landasan hukum operasional organisasi. Adapun landasan hukum bagi operasional organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Daerah Kantor Wilayah Jawa Barat I Bandung adalah didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Daerah Kantor Wilayah Jawa Barat I Bandung dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi KPP Kanwil Jawa Barat I Bandung

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006 tersebut, Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama,
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi;
4. Seksi Pengolah Data dan Informasi;

5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.3 Uraian Tugas KPP

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. Melakukan penyuluhan (pembinaan terhadap karyawan yang ada di dalam wewenang kekuasaannya);
   b. Melakukan peningkatan pelayanan;
   c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu :
      c1. Pajak Penghasilan (PPh);
      c2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
      c3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
      c4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
      c5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan (BPHTB);
      c6. Pajak Tidak Langsung Lainnya.
   d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan urusan kepegawaian;
b. Melakukan urusan keuangan;
c. Melakukan urusan tata usaha; dan
d. Melakukan urusan rumah tangga (kantor).

3. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan dan menatausahakan pengamatan potensi perpajakan;
b. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak;
c. Melaksanakan penilaian objek pajak; dan
d. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dan mengolah data;
b. Menyajikan informasi perpajakan;
c. Merekam dokumen perpajakan;
d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan;
e. Melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB;
f. Melaksanakan dukungan teknis komputer;
g. Melakukan pemantapan *e-SPT* dan *e-filling*; dan
h. Menyimpan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
b. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;
c. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan dan surat lainnya;
d. Melakukan penyuluhan perpajakan;
e. Melaksanakan peregistrasian wajib pajak; dan
f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP);
b. Melaksanakan pembimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;
c. Melaksanakan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
d. Merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
e. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan prosedur keberatan;
f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
g. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
h. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat *company profile*;
i. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;
j. Menganalisis kinerja wajib pajak; dan

k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemriksaan, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pemeriksaan;
b. Melaksanakan pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan;
c. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak); dan
d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan dan menatausahakan penagihan aktif
b. Melaksanakan penagihan piutang pajak;
c. Penundaan angsuran tunggakan pajak;
d. Usulan penghapusan piutang pajak; dan
e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b. Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.2 Karakter Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Untuk variabel Aplikasi Data Mining, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Pajak, kuesioner diberikan kepada responden yaitu petugas seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksaan.

4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pria	21	70%
Wanita	9	30%
Jumlah	**30**	**100%**

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin pria berjumlah 21 orang atau sebesar 70% dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 9 orang atau sebesar 30%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria.

4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang bekerja di bawah 1 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 10%, responden dengan masa kerja 1 - 3 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 10%, responden dengan masa kerja 4 - 5 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 10%, dan responden dengan masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 70%.

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 1 tahun	4	10%
1 - 3 tahun	4	10%
4 - 5 tahun	4	10%
> 5 tahun	18	70%
Jumlah	**30**	**100%**

Mayoritas responden pada penelitian ini dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Hal tersebut menunjukkan mayoritas pegawai DJP khususnya pada seksi Pemeriksaan memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap DJP, selain itu diperlukan pengalaman lebih untuk melakukan pemeriksaan.

Pengalaman merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pekerjaan, karena pengalaman masa lalu seseorang dapat berpengaruh terhadap pekerjaan yang sekarang dilakukan. Mengenai lamanya pengalaman yang berbeda antar reponden turut berpengaruh dalam menjalankan pekerjaannya. Pegawai yang berpengalaman lebih lama akan lebih mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja yang dihadapi, sehingga keberhasilan ataupun kegagalan dimasa lampau dapat dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu dengan lamanya bekerja

Loyalitas kerja akan tercipta apabila pegawai merasa trcukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup dari pekerjaannya, sehingga meraka betah bekerja dalam

suatu perusahaan. Yuliandri dalam Kadarwati (2003) menegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah adanya fasilitas-fasilitas kerja, tinjauan kesejahteraan, suasana kerja, upah yang diterima dari perusahaan, dan pengalaman kerja. Pengalaman yang diperoleh dari perusahaan, yaitu internalisasi individu terhadap perusahaan setelah melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan sehingga menimbulkan rasa aman, merasakan adanya keputusan pribadi yang dipenuhi oleh perusahaan.

4.3. Analisis Deskripsi Variabel

4.3.1 Analisis Deskripsi Aplikasi Data Mining

Aplikasi data mining pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Untuk mendapatkan gambaran variabel data mining secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh dimensi yang membentuknya, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Mengenai Aplikasi Data Mining pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Dimensi Variabel Data Mining	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen (%)	Kriteria
1. Klasifikasi	191	300	63,67	C. Baik
2. Asosiasi	204	300	68,00	C. Baik
3. Cluster	101	150	67,33	C. Baik
Total Skor Aplikasi Data Mining (X)	496	750	66,13	C. Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Kurang baik (36,2%-52,3%)
e. Tidak baik (0,00%-36,10%)

Dari hasil jawaban atas kuesioner yang diberikan responden pegawai di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung, menunjukkan bahwa aplikasi data mining termasuk katagori cukup baik, dengan skor aktual aplikasi data mining sebesar 66,13%, dari skor ideal. Artinya aplikasi data mining yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung baru mencapai 66,13%

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi aplikasi data mining :

1. Klasifikasi

Gambaran mengenai klasifikasi aplikasi data mining pada KPP di Wilayah Kota Bandung terangkum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Kkalsifikasi

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Pengelompokan data dalam database	F	1	12	14	3	0	101	150	67,33
		%	3,3	40,0	46,7	10,0	0,0			
2	Integrasi data dalam database	F	1	7	13	9	0	90	150	60,00
		%	3,3	23,3	43,3	30,0	0,0			
	% Skor Aktual Dimensi Klasifikasi							191	300	63,67

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk dimensi klasifikasi data mining sebesar 63,67% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya klasifikasi data dalam database organisasi pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dikelompokkan sesuai kriteria dan sudah terintegrasi dengan cukup baik. Persentase skor tanggapan responden pada masing-masing indikator yang membentuk dimensi klasifikasi aplikasi data mining dijelaskan sebagai berikut :

1). Pengelompokan Data dalam Database

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pengelompokan data dalam database sebesar 67,33%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, pengelompokan data dalam database sudah cukup sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan

2). Integrasi Data dalam Database

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator integrasi data dalam database sebesar 60,00%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, data dalam database sudah dintegrasikan dengan cukup baik

2. Asosiasi

Gambaran mengenai asosiasi data mining pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung terangkum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Asosiasi

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Hubungan data WP satu sama lain	F	2	15	8	5	0	104	150	69,33
		%	6,7	50,0	26,7	16,7	0,0			
2	Indikasi WP melakukan kecurangan Perpajakan	F	1	12	13	4	0	100	150	66,67
		%	3,3	40,0	43,3	13,3	0,0			
	% Skor Aktual Dimensi Asosiasi							204	300	68,00

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk dimensi asosiasi data mining sebesar 68,00% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya asosiasi data dalam database organisasi pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung pada umumnya dapat berhubungan antara data wajib pajak (WP) satu sama lain dan diketahui jika

WP melakukan kecurangan perpajakan. Persentase skor tanggapan responden pada indikator yang membentuk dimensi asosiasi data mining dijelaskan sebagai berikut :

1). Hubungan Data WP satu sama lain

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator hubungan data WP satu sama lain dalam database sebesar 69,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, dalam database organisasi terdapat hubungan data WP satu sama lain.

2). Indikasikan jika WP melakukan Kecurangan Perpajakan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator indikasi jika WP melakukan kecurangan Perpajakan dalam database sebesar 66,67%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, data dalam database dapat diketahui indikasi jika WP melakukan kecurangan perpajakan

3. Cluster

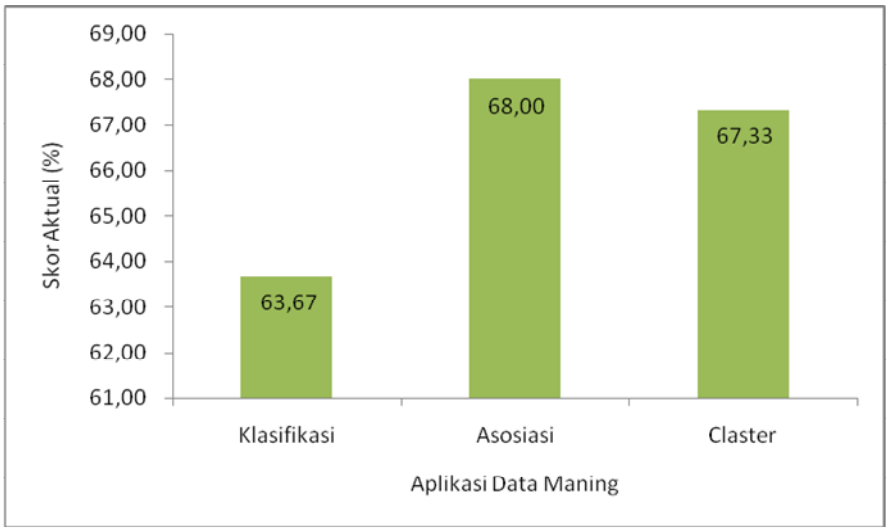
Gambaran mengenai cluster data mining pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung terangkum pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Cluster

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Pengumpulan data tanpa tanpa atribut kelas	F	1	12	14	3	0	101	150	67,33
		%	3,3	40,0	46,7	10,0	0,0			
	% Skor Aktual Dimensi Cluster							101	150	67,33

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi cluster data mining sebesar 67,33% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya cluster data dalam database organisasi pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dapat diperoleh

pendapatan Wajib Pajak dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap dimensi klasifikasi, asosiasi dan cluster data mining KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Histrogram Tanggapan Responden terhadap Aplikasi Data Mining

4.3.2 Analisis Deskripsi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Untuk mendapatkan gambaran variabel pemeriksaan pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh dimensi yang membentuknya, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Penilaian/Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Dimensi Variabel Pemeriksaan Pajak	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen (%)	Kriteria
1. Kualitas Auditor	399	600	66,50	C. Baik
2. Pelaksanaan Pemeriksaan	801	1.200	66,75	C. Baik
Total Skor Pemeriksaan Pajak (Y)	1.200	1.800	66,67	C. Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Tidak baik (36,2%-52,3%)
e. Sangat tidak baik (0,00%-36,10%)

Berdasarkan data tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa tanggapan yang diberikan responden pegawai di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung, dalam hal pemeriksaan pajak termasuk katagori cukup baik, dengan skor aktual data pemeriksaan pajak sebesar 66,67%, dari skor ideal. Artinya kualitas pemeriksaan pajak yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung baru mencapai 66,67%.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi pemeriksaan pajak :

1. Kualitas Auditor

Gambaran mengenai kualitas auditor pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung terangkum pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Kualitas Auditor

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Pelatihan pemeriksaan pajak dalam organisasi	F %	1 3,3	11 36,7	10 33,3	8 26,7	0 0,0	95	150	63,33
2.	Mengikuti seminar pela-tihan perpajakan yang diadakan DJP atau organisasi terkait	F %	1 3,3	13 43,3	13 43,3	3 10,0	0 0,0	102	150	68,00
3.	Integritas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan peraturan	F %	2 6,7	14 46,7	4 13,3	10 33,3	0 0,0	98	150	65,33
4.	Pemeriksaan sudah sesuai dengan peraturan	F %	1 3,3	17 56,7	7 23,3	5 16.7	0 0,0	104	150	69,33
	% Skor Aktual Dimensi Kualitas Auditor							399	600	66,50

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi kualitas auditor dalam pemeriksaan pajak

sebesar 66,50% dan termasuk dalam kategori Cukup baik. Artinya kualitas auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi pemeriksaan kualitas auditor :

1). Pendidikan dan Pelatihan

a. Pelatihan Pemeriksaan Pajak

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pelatihan pemeriksaan pajak sebesar 63,33%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, auditor sudah mendapatkan pelatihan pemeriksaan pajak dengan baik

b. Seminar Pelatihan Perpajakan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator seminar pelatihan perpajakan sebesar 68,00%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, auditor sudah sering mengikuti seminar pelatihan perpajakan yang diselenggarakan DJP atau oragnisasi terkait

2). Integritas Auditor

a. Integritas Pemeriksa

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator integritas pemeriksa dalam pelaksanaan peeriksaan pajak berdasarkan peraturan sebesar 65,33%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, integritas pemeriksa dalam pelaksanakan pemeriksaan pajak sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

b. Integritas Pemeriksaan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator integritas pemeriksaan pajak sebesar 69,33%, termasuk dalam kategori cukup baik.

Artinya, integritas pemeriksaan pajak susah sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung terangkum pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Proses pemeriksaan menggunakan komputer atau alat teknologi lain	F %	2 6,7	16 53,3	4 13,3	8 26,7	0 0,0	102	150	68,00
2.	Alat teknologi yang digunakan sudah cukup memadai	F %	1 3,3	17 56,7	7 23,3	5 16,7	0 0,0	104	150	69,33
3.	Jumlah pemeriksa pajak memadai	F %	2 6,7	13 43,3	9 30,0	6 20,0	0 0,0	101	150	67,33
4.	Dalam setiap pemeriksaan mengacu pada program pemeriksaan	F %	1 3,3	5 16,7	14 46,7	10 33,3	0 0,0	87	150	58,00
5.	Dalam setiap pemeriksaan meminjam dokumen	F %	1 3,3	12 40,0	13 43,3	4 13,3	0 0,0	100	150	66,67
6.	Melakukan kroscek dengan pihak ketiga mengenai informasi atau data WP	F %	1 3,3	15 50,	12 40,0	2 6,7	0 0,0	105	150	70,00
7.	Seluruh bukti dan hasil pemeriksaan	F %	1 3,3	16 53,3	8 26,6	5 16,7	0 0,0	103	150	68,67
8.	Seluruh hasil akhir yang sudah diberitahukan kepada WP	F %	1 3,3	14 46,6	8 26,7	7 23,3	0 0,0	99	150	66,00
	% Skor Aktual Dimensi Pelaksanan Pemeriksaan							801	1.200	66,75

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 80,25% dan termasuk kategori baik. Artinya pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan baik.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi pemeriksaan kualitas auditor :

1). Teknologi Informasi

a. Proses Pemeriksaan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator proses peeriksaan sebesar 68,00%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, proses pemeriksaan pajak telah menggunakan komputer atau alat teknologi lain

b. Alat Teknologi

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator alat teknologi sebesar 69,33%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, proses pemeriksaan pajak telah menggunakan alat teknologi yang cukup memadai

2) Rasio Sumber Daya Manusia

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator rasio sumber daya manusia sebesar 67,33%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, rasio SDM dalam proses pemeriksaan pajak cukup memadai

3) Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator ruang lingkup dan program pelaksanaan pajak sebesar 58,00%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, ruang lingkup dan program pemeriksaan pajak dilakukan dengan baik

4) Pemeriksaan Dokumen

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pemeriksaan dokumen sebesar 66,67%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam setiap pemeriksaan pajak pemeriksa selalu meminjam dokumen yang diperlukan

5) Konfirmasi/Koscek ke Pihak Ketiga

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator konfirmasi/koscek ke pihak ketiga sebesar 70,00%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam setiap pemeriksaan pajak pemeriksa selalu mengadakan koscek ke pihak ketiga

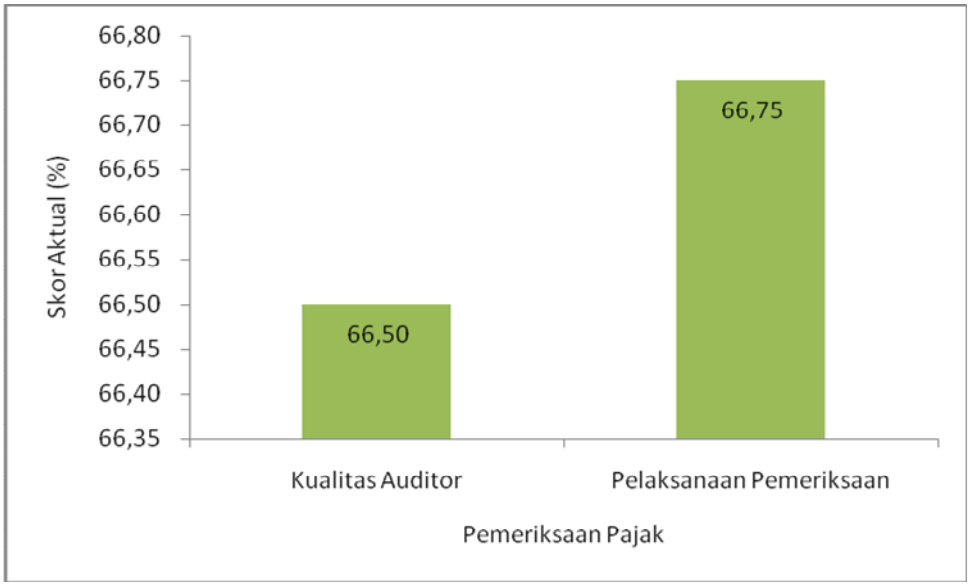
6) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator bukti dan hasil pemeriksaan sebesar 68,67%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam setiap pemeriksaan pajak selalu dilengkapi dengan bukti hasil pemeriksaan

7) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar 66,00%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam setiap pemeriksaan pajak pemeriksa selalu mengadakan pembahasan hasil akhir pemeriksaan kepada Wajib Pajak

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap dimensi kualitas auditor dan proses pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Histrogram Tanggapan Responden terhadap Pemeriksaan Pajak

4.3.3 Analisis Deskripsi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Untuk mendapatkan gambaran variabel kepatuhan pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh dimensi yang membentuknya, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Dimensi Variabel Kepatuhan Pajak	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen (%)	Kriteria
1. Kejujuran dalam mengisi SPT	195	300	65,00	C. Baik
2. Kelengkapan dalam mengisi SPT	206	300	68,67	C. Baik
3. Penyampaian SPT tepat waktu	197	300	65,67	C. Baik
Total Skor Kepatuhan Pajak (Z)	598	900	66,64	C. Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Tidak baik (36,2%-52,3%)
e. Sangat tidak baik (0,00%-36,10%)

Dari hasil jawaban atas kuesioner yang diberikan responden pegawai di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung, menunjukkan bahwa kepatuhan pajak termasuk katagori cukup baik, dengan skor aktual kepatuhan pajak sebesar 66,64%, dari skor ideal. Artinya wajib pajak dalam kepatuhan dalam pembayaran pajak baru mencapai 66,64%.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi kepatuhan pajak :

1. Kejujuran dala mengisi SPT

Gambaran mengenai pengisian SPT oleh WP pada KPP di Wilayah Kota Bandung terangkum pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Kejujuran Pengisian SPT

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan ketentuan	F	2	12	11	5	0	101	150	67,33
		%	6,7	40,0	36,7	16,67	0,0			
2.	Wajib pajak sudah menuangkan semua data pribadinya dalam SPT	F	1	12	7	10	0	94	150	62,67
		%	3,3	40,0	23,3	33,3	0,0			
	% Skor Aktual Dimensi Pengisian SPT dengan Jujur							195	300	65,00

Pada Tabel 4.11 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi kejujuran dalam pengisian SPT sebesar 65,00% dan termasuk kategori cukup baik. Artinya kepatuhan wajib pajak dalam pengisian SPT pada KPP di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan cukup jujur. Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi kejujuran dalam mengisi SPT :

1) Mengisi SPT sesuai dengan Ketentuan

   Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pengisian SPT sesuai dengan ketentuan sebesar 67,33%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam setiap pengisian SPT, wajib pajak sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan

2) Data Pribadinya dalam SPT

   Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pengisian data pribadi dalam pengisian sebesar 62,67%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam setiap pengisian SPT, wajib pajak sudah menuangkan semua data pribadinya dalam SPT

2. Kelengkapan Mengisi SPT

Gambaran mengenai kelengkapan mengisi SPT oleh WP pada KPP di Wilayah Kota Bandung terangkum pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Kelegkapan dalam Mengisi SPT

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	WP mengetahui apa saja yang harus diisi dalam SPT	F	1	17	7	5	0	104	150	69,33
		%	3,3	56,7	23,3	16,7	0,0			
2.	SPT diisi lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	F	1	16	7	6	0	102	150	68,00
		%	3,3	53,3	23,3	20,0	0,0			
	% Skor Aktual Dimensi Kelengkapan Mengisi SPT							206	300	68,67

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi kelengkapan dalam pengisian SPT sebesar 68,67% dan termasuk kategori cukup baik. Artinya kepatuhan wajib pajak dalam pengisian SPT pada KPP di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan cukup lengkap. Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi kelengkapan dalam mengisi SPT :

1) WP mengetahui Data yang harus diisi dalam SPT

   Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pengisian data yang harus diisi dalam SPT sebesar 69,33%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam setiap pengisian SPT, wajib pajak sudah mengetahui data yang harus diisiu dalam SPT

2) SPT Lengkap sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

   Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pengisian SPT sudah sesuai dengan ketentun perundang-undangan sebesar 68,00%, termasuk dalam

kategori cukup baik. Artinya, dalam setiap pengisian SPT, wajib pajak sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan perudang-undangan

3. Ketepatan Penyampaian SPT

Gambaran mengenai penyampaian SPT tepat waktu oleh WP pada KPP di Wilayah Kota Bandung terangkum pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Penyampian SPT Tepat Waktu

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	WP mengetahui tanggal penyampaian SPT	F %	1 3,3	15 50,0	6 20,0	8 26,7	0 0,0	99	150	66,00
2.	WP selalu menyampaikan SPT sesuai tanggal yang ditentukan	F %	1 3,3	14 46,7	7 23,3	8 26,7	0 0,0	98	150	65,33
	% Skor Aktual Dimensi Kelengkapan Mengisi SPT							297	300	65,67

Pada Tabel 4.13 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi penyampaian SPT tepat waktu sebesar 65,67% dan termasuk kategori cukup baik. Artinya kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT pada KPP di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi penyampaian SPT tepat waktu :

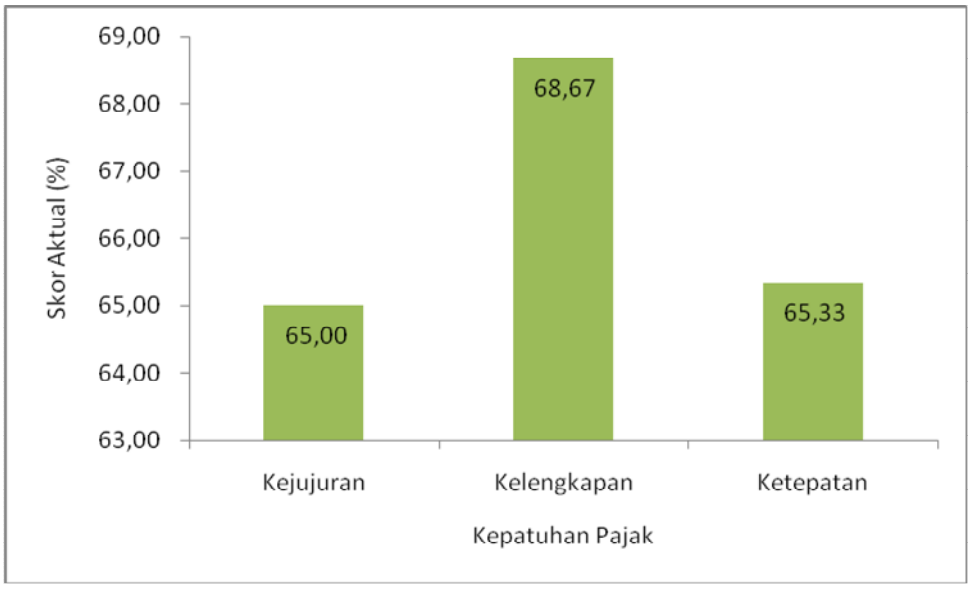
1) Tanggal Penyampaian SPT

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator tanggal penyampaian SPT sebesar 66,00%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam wajib pajak telah mengetahui tanggal penyampaian SPT

2) Penyampaian SPT Sesuai Tanggal yang Ditentukan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator penyampaian SPT sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebesar 65,33%, termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya, dalam wajib pajak dala penyampaian SPT sudah sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap dimensi kejujuran, kelengkapan dan penyampaian SPT tepat waktu oleh wajib pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 4.4.

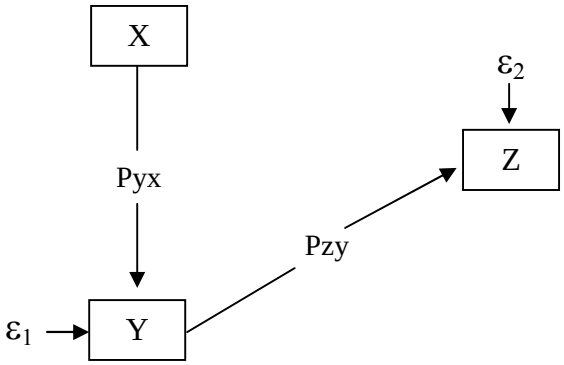


Gambar 4.4. Histrogram Tanggapan Responden terhadap Kepatuhan Pajak

4.4. Hasil Analisis Metode Verifikatif

Semakin baik data mining diharapkan dapat memudahkan pemeriksaan pajak sehingga dengan meningkatnya kualitas pemeriksaan pajak diharapkan juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang terkumpul, pada penelitian ini akan diuji pengaruh data mining terhadap pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengujian akan dilakukan dua tahap,

dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh data mining terhadap peeriksaan pajak, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5. Model Analisis Jalur

Gambar diagram jalur seperti terlihat di atas dapat diformulasikan kedalam dua bentuk persamaan struktural sebagai berikut :

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama :

$Y = Pyx\ X + \varepsilon_1$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua :

$Y = Pzy\ Y + \varepsilon_2$

Keterangan :

X = Aplikasi Data Mining

Y = Pemeriksaan Pajak

Z = Kepatuhan Pajak

P_{YX} = Koefisien jalur aplikasi data mining terhadap pemeriksaan pajak

P_{ZY} = Koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak

ε = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel penelitian (skala ordinal), maka sebelum menguji pengaruh budaya organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan implikasinya terhadap kualitas informasi terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.* Dari data masing-masing variabel, diperoleh rekap data untuk perhitungan analisis jalur dapat dilihat pada Lampiran 3.

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan *software* SPSS 20 dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke Tabel interpretasi koefisien korelasi berikut :

Tabel 4.14
Katagori Koefisien Korelasi (r) Metode Guliford

No.	Besarnya Pengaruh	Katagori
1.	0,00 – 0,20	Sangat longgar dapat diabaikan
2.	0,21 – 0,40	Rendah
3.	0,41 – 0,60	Sedang/Cukup
4.	0,61 – 0,80	Erat/Kuat
5.	0,81 – 1,00	Sangat Erat/Sangat kuat

Sumber : Umi Narimawati (2010:52)

4.4.1 Keterkaitan Antar Variabel

Untuk mengetahui korelasi antara variabel data mining (X) dengan pemeriksaan pajak (Y) dan antara pemeriksaan pajak (Y) dengan kepatuhan pajak

(Z). Hasil analisis korelasi antara variabel yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 4.15, dan Lampiran 4.

Tabel 4.15
Koefisien Korelasi antara Variabel X dengan Y, dan Y dengan Z

Pearson Correlation		t_{hitung}	$t_{0.05(30-2)}$	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
rXY	0,478	2,880	2,048	0,008	H_0 ditolak, terdapat hubungan sangat erat antara aplikasi data mining (X) dengan pemeriksaan pajak (Y)
rYZ	0,416	2,421	2,048	0,022	H_0 ditolak, terdapat hubungan erat antara pemeriksaan pajak (Y) dengan kepatuhan pajak (Z)

Sumber : Data Diolah (2012)

Berdasarkan nilai koefisien korelasi di atas dapat dilihat bahwa keterkaitan atau hubungan antara data mining (X) dangan pemeriksaan pajak (Y) sebesar 0,478 dan masuk dalam kategori sedang. Arah hubungan positif antara aplikasi data mining dengan pemeriksaan pajak, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi data mining yang baik cenderung diikuti dengan pemeriksaan pajak yang baik. Kemudian hubungan antara pemeriksaan pajak (Y) dengan kepatuhan pajak (Z) sebesar 0,416 juga termasuk dalam kategori sedang, dengan arah hubungan positif, hal ini menunjukkan bahwa dengan peeriksaan pajak yang baik cenderung diikuti dengan kepatuhan pajak dari wajib pajak yang baik pula.

4.4.2 Pengujian Jalur Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel data mining berperan sebagai variabel independen (*eksogenus variable*) dan pemeriksaan pajak sebagai variabel dependen (*endogenus variable*). Selanjutnya untuk menguji pengaruh data mining terhadap pemeriksaan pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (data mining), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$P_{YX} = r_{XY} = 0{,}478$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh koefisien jalur data mining terhadap pemeriksaan pajak sebagai berikut :

Tabel 4.16
Koefisien Jalur Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.908	2.495		2.368	.025
	Data Mining (X)	.243	.085	.478	2.878	.008

a. Dependent Variable: Pemeriksaan Pajak (Y)

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,478 pada Tabel 4.18 merupakan nilai koefisien jalur aplikasi data mining terhadap pemeriksaan pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel aplikasi data mining terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Keoefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi data mining terhadap pemeriksaan pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$P_{YX}^2 = r_{XY}^2 = (0{,}478)^2 = 0{,}228$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh koefisien determinasi data mining terhadap pemeriksaan pajak sebagai berikut :

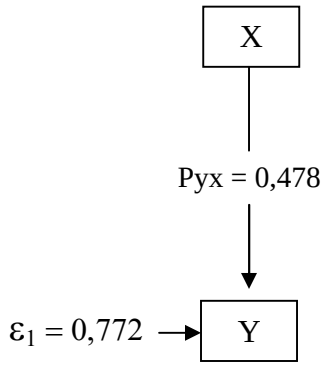
Tabel 4.17
Koefisien Determinasi Aplikasi Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.478[a]	.228	.201	2.1255

a. Predictors: (Constant), Data mining (X)

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa aplikasi data mining memberikan pengaruh sebesar 22,8% terhadap pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung, hal ini bisa dikategorikan cukup karena dimensi aplikasi data mining dan pemeriksaan pajak pun berkategorikan cukup. Sementara sisa yang mempengaruhi pemeriksaan pajak sebesar 77,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar aplikasi data mining yang diteliti. Faktor-faktor lain tersebut adalah Teknologi Informasi (Athanasius Vazakidis:2005), Kualitas SDM (Edly Ferddin) dan Pelaporan Keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah aplikasi data mining berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara parsial. Pada pengujian parsial, apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka H_0 diterima.

Hopotesis :

$H_0 = P_{YX} = 0$: Aplikasi data mining tidak berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak

$H_a = P_{YX} \neq 0$: Aplikasi data mining berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada Tabel 4.20 diperoleh koefisien jalur data mining terhadap pemeriksaan pajak sebesar 0,478. Karena koefisien jalur data mining (0,478) lebih besar dari nol, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi data mining berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung**.**

4.4.2 Pengujian Jalur Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel pemeriksaan pajak berperan sebagai variabel independen (*eksogenus variable*) dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (*endogenus variable*). Selanjutnya untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (pemeriksaan pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$P_{ZY} = r_{YZ} = 0{,}416$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut :

Tabel 4.18
Koefisien Jalur Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.717	2.816		2.386	.024
	Pemeriksaan Pajak (Y)	.231	.095	.416	2.421	.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Z)

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,416 pada Tabel 4.20 merupakan nilai koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Keoefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$P_{ZX}^2 = r_{YZ}^2 = (0{,}416)^2 = 0{,}173$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

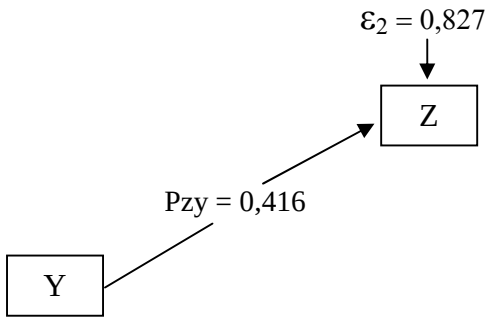
Tabel 4.19
Koefisien Determinasi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.416[a]	.173	.144	2.39878

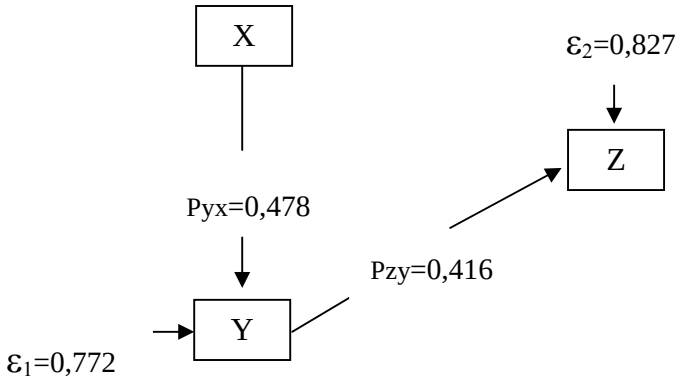
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (Y)

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 17,3% terhadap kepatuhan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung, hal ini bisa dikategorikan cukup karena dimensi pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak pun berkategorikan cukup. Sementara sisa yang mempengaruhi kepatuhan pajak sementara sisanya sebesar 82,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pemeriksaan pajak yang diteliti. . Faktor-faktor lain tersebut adalah Pengetahuan dan Persepsi WP (Supriyati&Nurhiadayti:2008), dan Perilaku Wajib Pajak (Tarjo & Indra: 2006). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7. Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

Untuk lebih jelas mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan aplikasi data mining terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak. Maka dapat dilihat pada gambar 4.8.



Gambar 4.8. Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama dan Kedua

3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara parsial. Pada pengujian parsial, apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka H_0 diterima.

Hopotesis :

$H_0 = P_{ZY} = 0$: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

$H_a = P_{ZY} \neq 0$: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada Tabel 4.22 diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,416. Karena koefisien jalur data mining (0,416) lebih besar dari nol, maka H_0 ditolak dan H_a

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung**.**

4.5. Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan analisis deskriptif aplikasi data mining berada pada katagori cukup baik dengan persentase sebesar 66,13%, sedangkan pemeriksaan pajak berada pada kategori cukup baik dengan persentase sebesar 66,67%. Namun masih perlu ditingkatkan menjadi katagori baik ideal. Dalam peningkatan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung perlu mempertimbangkan indikator variabel data mining dan pemeriksaan pajak yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu :

1. Dimensi klasifikasi terutama indikator integrasi data perlu ditingkatkan dalam menyatukan langkah untuk mencapai tujuan organisasi
2. Dimensi cluster perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dalam database organisasi dapat mengungkap pendapatan Wajib Pajak (WP) dari yang terkecil hingga terbesar
3. Dalam variabel pemeriksaan pajak, kualitas auditor, terutama dalam integritas auditor perlu ditingkatkan lagi, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
4. Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang perlu ditingkatkan adalah indikator jumlah pemeriksa pajak, hal ini karena beban kerja yang ditanggung oleh pemeriksa harus disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada

pada pemeriksa. Jika tidak bisa menyesuaikan jumlah SDM maka harus diatasi dengan melengkapinya dengan teknologi informasi dalam pemeriksaan. Selain itu pelaksanaan sesuai program dan ruang lingkup pun masih memiliki masalah, masih banyak pemeriksaan yang melebihi waktu pemeriksaan yang ditentukan.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh koefisien jalur data mining terhadap pemeriksaan pajak sebesar 0,478. Karena koefisien jalur data mining (0,478) lebih besar dari nol, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data mining berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung**.**

Data mining sangat mempengaruhi audit pajak yaitu untuk lebih mengefektif dan efisienkan pemeriksaan pajak (Manish Gupta, 2004). Pemeriksaan yang masih menggunakan sistem tradisional maka akan mendapat masalah seperti redundansi data dan inkonsistensi data, ketergantungan program data, kurangnya fleksibilitas, Keamanan yang buruk, kekurangan dalam pembagian dari ketersediaan data (Laudon, 2004). Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem database modern untuk menyediakan informasi yang berkualitas yang dapat mensuport efektivitas implementasi SIDJP yang lebih lanjut akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dengan lebih efisien. Sistem database modern sebagai support sistem informasi yang membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik (Laudon, 2008).

Data Mining merupakan teknologi yang sangat berguna untuk membantu perusahaan menemukan informasi yang sangat penting dari gudang data. Dengan data mining dapat meramalkan tren dan sifat-sifat perilaku bisnis yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan penting. Analisis yang diotomatisasi yang dilakukan oleh data mining melebihi yang dilakukan oleh sistem

pendukung keputusan tradisional yang sudah banyak digunakan. Data Mining mengeksplorasi basis data untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi, mencari informasi untuk memprediksi yang mungkin saja terlupakan oleh para pelaku bisnis karena terletak di luar ekspektasi mereka (Kusnawi, 2007).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan alasan Kemajuan Teknologi Informasi yang telah dimaanfaatkan oleh WP harus diiringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa (John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010). Salah satu teknologi informasi adalah teknologi database yang dapat mengatasi banyak masalah organisasi file tradisional. (Laudon, 2008:265). Dan salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah data mining, karena data mining meliputi kegiatan pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set berukuran besar dalam database (Budi Santosa, 2007:10)

4.5.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan analisis deskriptif peeriksaan pajak berada pada katagori cukup baik dengan persentase sebesar 66,67%, sedangkan kepatuhan pajak berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 66,64%. Namun masih perlu ditingkatkan menjadi katagori baik ideal. Dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung perlu mempertimbangkan indikator variabel pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu :

1. Dalam variabel pemeriksaan pajak, kualitas auditor, teruma dalam integritas auditor perlu ditingkatkan lagi, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak

dapat bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.

2. Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang perlu ditingkatkan adalah indikator jumlah pemeriksa pajak, hal ini karena beban kerja yang ditanggung oleh pemeriksa harus disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada pada pemeriksa. Jika tidak bisa menyesuaikan jumlah SDM maka harus diatasi dengan melengkapinya dengan teknologi informasi dalam pemeriksaan. Selain itu pelaksanaan sesuai program dan ruang lingkup pun masih memiliki masalah, masih banyak pemeriksaan yang melebihi waktu pemeriksaan yang ditentukan.
3. Kelengkapan dalam pengisian SPT perlu lebih ditingkatkan lagi, dengan cara mensolisasikan cara pengisian SPT selengkapnya kepada wajib pajak
4. Dimensi ketepatan penyampaian SPT, terutama penyampaian SPT oleh wajib pajak perlu ditingkatkan, dengan cara mensolisasikan kepada wajib pajak agar dapat menyampaikan SPT sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,416. Karena koefisien jalur pemeriksaan pajak (0,416) lebih besar dari nol, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung**.**

Pemeriksaan adalah salah satu kunci dalam pelaksanaan self assessment sistem, pengalaman dalam pemeriksaan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Khadijah Isa and Jeff Pope, 2011)

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka Self Assesment System merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan system SAS

yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Harus berpegang teguh pada Undang-undang Perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:244)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa bila data mining berfungsi baik, maka proses pelaksanaan pemeriksaan pajak akan lebih baik, dengan baiknya pemeriksaan pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal tersebut karena salah satu tujuan dari pemeriksaan adalah kepatuhan pajak. Adapun pengertian Kepatuhan Pajak adalah sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.